



Membedah Tren Tingginya Angka Pengangguran Terbuka Pada Gen Z Di Indonesia

Analyzing the High Open Unemployment Rate Among Gen Z in Indonesia

Riska Dian Safitri^{1*}, Muh Rezza²

¹Sosiologi, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Gadjah Mada

²Sosiologi, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Halu Oleo

Email : riskadiansafitri2528@gmail.com¹, rezamuh3162@gmail.com²

Article history :

Received : 05-01-2025

Revised : 07-01-2025

Accepted : 09-01-2025

Published : 12-01-2025

Abstract

Unemployment is a critical issue in assessing the welfare of a country, especially in Indonesia, where the workforce continues to grow alongside population growth. Although there has been a decrease in the unemployment rate from 2023 to 2024, the overall unemployment rate remains high, with Generation Z (18-24 years old) contributing significantly. Graduates of vocational schools (SMK), high schools (SMA), and universities face many challenges in entering the labor market due to a mismatch between their skills and industry needs. This study aims to analyze the high unemployment trend among Gen Z in Indonesia using a qualitative descriptive approach. The method used is descriptive statistical analysis, with secondary data sourced from BPS and ILO. The discussion reveals that while the government has launched the Pre-Employment Card program, it still faces implementation challenges, such as the low effectiveness of online training and the mismatch between incentives and completed training. Based on Talcott Parsons' structural-functional theory, the role of educational institutions and government policies in adapting to labor market needs is crucial to reducing unemployment. The conclusion of this study is that while the government has made efforts to reduce unemployment through training programs, evaluation and improvement in their implementation are necessary to make them more effective in reducing unemployment among Gen Z.

Keywords : unemployment, Gen Z, Pre-Employment

Abstrak

Masalah pengangguran menjadi isu penting dalam menilai kesejahteraan suatu negara, terutama di Indonesia, di mana angkatan kerja terus meningkat seiring pertumbuhan populasi. Meskipun terjadi penurunan angka pengangguran dari 2023 ke 2024, jumlah pengangguran tetap tinggi, dengan Generasi Z (18-24 tahun) menjadi penyumbang utama. Lulusan SMK, SMA, dan perguruan tinggi banyak menghadapi kesulitan dalam memasuki pasar kerja karena ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren tinggi pengangguran pada Gen Z di Indonesia dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, dengan data sekunder yang bersumber dari BPS dan ILO. Pembahasan mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah meluncurkan program Kartu Prakerja, program tersebut masih menghadapi kendala dalam implementasinya, seperti rendahnya efektivitas pelatihan daring dan



ketidaksesuaian insentif dengan pelatihan yang diselesaikan. Berdasarkan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, peran institusi pendidikan dan kebijakan pemerintah dalam mengadaptasi kebutuhan pasar kerja sangat penting untuk mengurangi pengangguran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran melalui program pelatihan, evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaannya sangat diperlukan agar lebih efektif dalam mengurangi angka pengangguran di kalangan Gen Z.

Kata Kunci : pengangguran, Gen Z, Kartu Prakerja

PENDAHULUAN

Dalam melihat tingkat kesejahteraan sebuah Negara, maka isu yang sering dibahas yakni permasalahan ketenagakerjaan dan pengentasan pengangguran. Kedua isu ini, menjadi bahasan utama. Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran saling berkaitan dan dapat menciptakan dilema. Dilema ini muncul, jika pemerintah tidak dapat mengelola dan mengurangi dampak yang ditimbulkan. Sebaliknya, tenaga kerja diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai, maka masalah tersebut dapat dihindari, bahkan dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan suatu negara(Soleh, 2017).

Di Negara Indonesia, dalam memahami laju perkembangan angkatan kerja dan pengangguran dapat dilihat dari laporan data stastiknya. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), usia kerja terus meningkat seiring bertambahnya populasi setiap tahun. Pada Februari 2024 mencapai 214,00 juta orang, meningkat 2,41 juta orang dibandingkan Februari 2023. Dari segi komposisi kerja, pada Februari 2024 terdapat 142,18 juta yang bekerja sedangkan 7,20 juta lainnya bersatus menganggur atau tidak bekerja. Selanjutnya, jika dilihat dari Februari 2023, jumlah pencari kerja bertambah yakni sebanyak 2,76 juta orang, penduduk yang bekerja meningkat sebanyak 3,55, sementara jumlah pengangguran berkurang sebesar 0,79 (BPS, 2024).

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa semakin bertambahnya tahun, dari tahun 2023 sampai 2024 terdapat pula penambahan angka usia tenaga kerja dan terdapat penurunan angka pengangguran. Meskipun terdapat penurunan angka pengangguran, penurunannya kurang signifikan. Data menunjukkan bahwa meskipun persentase pengangguran menurun namun angka tersebut masihlah tergolong tinggi. Hal ini menandakan bahwa peningkatan angkatan pencari kerja tidak seimbang dengan lowongan yang ada.

Mengutip dari pernyataan dari kemenker(Kementerian ketenagakerjaan) Indonesia, Ida Fauziyah dalam artikel(detikfinance/23/5/2024), mengatakan bahwa walaupun data angka pengangguran menurun, namun angka tersebut kemungkinan akan naik bahkan melambung semakin tinggi jika tidak ditangani dengan serius. Beliau, juga menambahkan bahwa hasil tersebut didasarkan pada survei yang dilakukan pada periode tahun 2021-2022 dimana perkiraan angka pengangguran akan melaju tinggi pada tahun-tahun berjalan dan seterusnya dan generasi angkatan kerja muda atau gen Z sebagai penyumbang terbanyak dalam peningkatan ini.

Lebih lanjut, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menjelaskan bahwa generasi Z yang mayoritas pengangguran ini terdiri dari lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi yakni yang berusia 18-24 tahun, umumnya baru saja menyelesaikan pendidikan menengah atau tinggi dan sedang dalam masa mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Hal tersebut didukung pula dengan data survey statistik, diketahui bahwa jumlah pengangguran terus naik yang didominasi oleh usia muda 15-24 tahun. Usia ini masuk dalam kategori NEET. Angka ini menandakan bahwa sekitar 22,25% dari total penduduk usia tersebut tidak terlibat dalam aktivitas produktif dan berstatus tidak bekerja, hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap bonus demografi yang diharapkan dapat membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045(Suhaeri, 2021).



Menurut laporan Bank Dunia (2012), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terlambatnya penerimaan tenaga pencari kerja di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya pendidik yang berkompeten dan kurangnya kebijakan level daerah. Selain itu, rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja diperparah oleh gap antara lowongan kerja dengan skill yang dipunya, serta berbagai permasalahan lainnya.

Pemerintah menyadari tantangan ini dan berupaya mengatasi masalah pengangguran dengan berbagai inisiatif. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan berbagai kebijakan pemerintah seperti prakerja, mendorong wirausaha dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal ini menjadi terobosan baru, untuk mewujudkan masa depan Indonesia Emas tahun 2045. Upaya tersebut merupakan sebagai langkah dalam peningkatan produktivitas pekerja.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis menerapkan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Creswell & Clark (2007) menjelaskan metode penelitian ini sebagai sebuah metode penelitian yang dilakukan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang ditemukan. Secara lebih lanjut, analisis yang digunakan yakni analisis statistik deskriptif. Analisis ini, digunakan untuk mereduksi data dengan tujuan untuk menginterpretasikan data dengan lebih mudah untuk dipahami (Morissan, 2015, hal. 234). Adapun sumber data yang digunakan yakni sekunder. Data ini meliputi data ILO (International Labour Organization) dan data BPS (Badan Pusat Statistik) terbaru.

Dalam melihat fenomena ini, penulis menggunakan teori structural-fungsionalisme Talcott Parsons. Parson, masyarakat dilihat sebagai sebuah bagian dari sistem yang harus dijaga kestabilannya dan keseimbangannya (Rusydiyah & Rohman, 2020). Parsons mengembangkan kerangka AGIL (adaptation, goal attainment, integration, dan latency) untuk menjelaskan bagaimana sistem sosial bertahan dan berfungsi (Umanailo, 2019).

Masing-masing komponen AGIL menggambarkan fungsi penting yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial agar dapat bertahan dan beroperasi secara efektif. Dalam konteks pengangguran, institusi pendidikan dan pasar kerja harus menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan industri (Adaptation). Pemerintah perlu menetapkan dan mencapai target pengurangan pengangguran melalui kebijakan efektif (Goal Attainment). Kolaborasi antara institusi pendidikan dan pemerintah penting untuk menjaga kohesi dan keteraturan (Integration). Nilai-nilai dan norma sosial yang mempengaruhi pilihan karir harus dipertahankan dan diperbarui sesuai kebutuhan (Latency). Kerangka AGIL membantu menganalisis dan bahan evaluasi terhadap pengangguran di kalangan generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangguran Terbuka Usia Kerja Di Indonesia.

Penduduk yang banyak dalam suatu negara dianggap sebagai bonus demografi yang penting dalam mencapai pembangunan nasional. Namun jika sumber daya tidak dapat dimaksimalkan, peningkatan penduduk secara terus menerus dapat menimbulkan masalah kependudukan, terutama terkait dengan pengangguran. Studi yang dilakukan oleh Nur et al. (2016) dan Aprianto (2013) tentang pengangguran di Indonesia menunjukkan bahwa di negara-negara sedang berkembang sumber daya manusia yang tidak bekerja di mayoritas oleh kelompok usia muda.

Pengangguran di kalangan remaja, khususnya mereka yang berusia 15-24 tahun, adalah masalah yang sangat serius. Berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO),



meskipun kelompok usia ini hanya mencakup 25% dari populasi usia kerja global, mereka menyumbang hampir setengah dari total pengangguran dunia(ILO, 2024). Informasi ini menunjukkan bahwa pengangguran di kalangan remaja adalah masalah yang sangat mendesak yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar, termasuk di Indonesia.

Menurut laporan Indonesia-Investments (2021), setiap penambahan jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencari pekerjaan setiap tahunnya, hal tersebut menantang pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru guna menyerap peningkatan jumlah pencari kerja (Jibril et al., 2022). Pengangguran di kalangan usia muda, terutama lulusan baru, menjadi fokus utama dalam bentuk penanganan masalah ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi menjadi krusial untuk mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah, mendukung pembangunan lintas sektor, dan menjadi kekuatan utama dalam upaya mengatasi masalah pengangguran.

Pengangguran di Indonesia, khususnya di kalangan usia muda, merupakan isu signifikan dalam panorama ketenagakerjaan. Generasi muda yakni generasi Z, yang umumnya lahir yakni tahun 1997 dan 2012, menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini menegaskan bahwa angka pengangguran memang didominasi oleh generasi muda dalam angkatan kerja (Sakitri, 2021). Untuk itu, maka penulis menunjukkan data dari sumber terpercaya yang menggambarkan bahwa benar terkait angka pengangguran didominasi oleh angkatan usia muda.

Bagan 1. Jumlah Pengangguran Menurut Kelompok Umur tahun 2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Informasi Lain:

Sumber: Data Pusat Statistik(BPS) Tahun 2022.

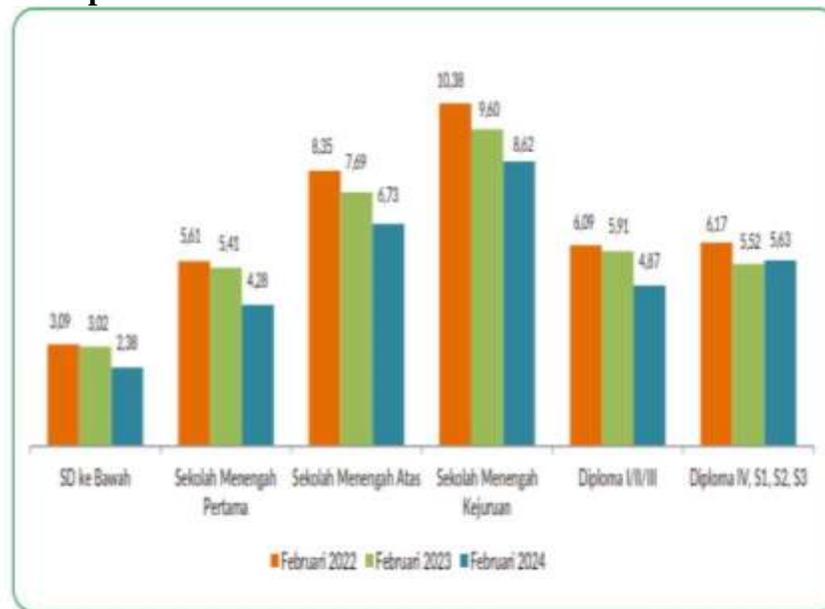
Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa secara signifikan pengangguran tertinggi terdapat pada angkatan kerja dengan kelompok usia muda. Mengambil data dari dua tahun terakhir yakni pada bulan Februari 2022, dapat diketahui bahwa lebih dari 59% dari total pengangguran berusia antara 15 hingga 29 tahun. Total pengangguran dalam kelompok usia ini mencapai 4,98 juta jiwa, dengan rincian yang mencolok, seperti 1,13 juta jiwa untuk usia 15-19 tahun, 2,5 juta jiwa untuk usia 20-24 tahun, dan 1,34 juta jiwa untuk usia 25-29 tahun. Angka pengangguran juga signifikan pada kelompok usia yang lebih tua, namun proporsi yang lebih tinggi pada usia muda menunjukkan bahwa masalah pengangguran terutama tertetap pada generasi muda. Hal ini mencerminkan tantangan besar dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi mereka yang baru memasuki pasar tenaga kerja.



Berdasarkan definisi umur Gen Z dari tahun 1997 hingga 2012, pada tahun 2024, anggota Gen Z akan berusia antara 12 hingga 27 tahun. Data Badan Pusat Statistik Indonesia menyebutkan lebih dari 59% dari total pengangguran di Indonesia terjadi di kalangan usia muda, khususnya antara 15 hingga 29 tahun. Rentang usia ini sebagian besar mencakup anggota Gen Z, yang saat ini berada dalam tahap awal memasuki atau baru-baru ini memasuki pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda, termasuk Gen Z, menghadapi tantangan signifikan dalam mencari pekerjaan dan memasuki dunia kerja, yang dapat berdampak pada tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan mereka.

Secara lebih lanjut dalam melihat pengangguran pada angkatan tenaga kerja yang didominasi oleh angkatan kerja usia muda generasi Z, maka perlu pula dilihat terkait data pendidikan dari angkatan usia muda ini.

Bagan 2. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan tingkat pendidikan Februari 2022–Februari 2024.



Sumber: Data Pusat Statistik(BPS) Tahun 2024.

Berdasarkan data dapat dibaca bahwa, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan mulai Februari 2022 hingga Februari 2024, terlihat adanya pola yang konsisten dan beberapa perubahan penting.

Pada Februari 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah mencapai 3,09 persen. Angka ini sedikit menurun menjadi 3,02 persen pada Februari 2023 dan turun lebih lanjut menjadi 2,38 persen pada Februari 2024. Untuk lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), TPT tercatat sebesar 5,61 persen pada Februari 2022, menurun menjadi 5,41 persen pada Februari 2023, dan turun signifikan menjadi 4,28 persen pada Februari 2024. Ini menunjukkan adanya peningkatan peluang kerja bagi lulusan SMP selama periode tersebut. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) juga menunjukkan penurunan TPT dari 8,35 persen pada Februari 2022 menjadi 7,69 persen pada Februari 2023, dan lebih lanjut menjadi 6,73 persen pada Februari 2024. Namun, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tetap memiliki TPT tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Pada Februari 2022, TPT untuk lulusan SMK adalah 10,38 persen. Angka ini menurun menjadi 9,60 persen pada Februari 2023 dan lebih



lanjut menjadi 8,62 persen pada Februari 2024. Meskipun ada penurunan, angka ini tetap menunjukkan bahwa lulusan SMK menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pekerjaan.

Untuk lulusan Diploma I/II/III, TPT menunjukkan tren penurunan dari 6,09 persen pada Februari 2022 menjadi 5,91 persen pada Februari 2023 dan turun lebih lanjut menjadi 4,87 persen pada Februari 2024. Ini menunjukkan bahwa lulusan diploma semakin mudah mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, lulusan pendidikan tinggi (Diploma IV, Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3)) mengalami penurunan TPT dari 6,17 persen pada Februari 2022 menjadi 5,52 persen pada Februari 2023. Namun, pada Februari 2024, TPT sedikit meningkat menjadi 5,63 persen. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa lulusan dengan pendidikan tinggi mungkin menghadapi persaingan yang lebih ketat atau ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dan yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

Berdasarkan data yang disajikan di atas dapat dilihat secara keseluruhan untuk periode Februari 2022 hingga Februari 2024, bahwa lulusan SMK dari Generasi muda (Gen Z) menjadi penyumbang terbesar terhadap angka pengangguran di Indonesia. Meskipun terjadi penurunan dari tahun ke tahun, TPT untuk lulusan SMK tetap yang tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya selama periode ini. Ini menunjukkan bahwa lulusan SMK menghadapi tantangan yang signifikan dalam memasuki pasar kerja dalam ketenagakerjaan di Indonesia.

Penyebab Pengangguran Usia Muda.

Tingginya angka pengangguran di kalangan usia muda dari Generasi Z mempunyai faktor pemicunya. Dalam memetakan pengangguran kalangan muda ini, penulis membagi alasan yang berbeda antara keduanya dalam melihat penyebab tingginya angka pengangguran ini. Disini, fokus penulis ingin menunjukkan penyebab tingginya angka pengangguran SMK dan disusul pada perguruan tinggi. Pemilihan ini berdasarkan temuan dari data statistik di atas bahwa kedua status pendidikan ini sebagai penyumbang pengangguran terbanyak dalam pengangguran usia muda.

a. Tingkat Pendidikan SMK

Sebagai angkatan muda dengan jumlah pengangguran terbanyak, lulusan SMK sebenarnya disiapkan untuk langsung masuk ke pasar tenaga kerja setelah lulus, berbeda dengan lulusan SMA yang umumnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dibentuknya SMK dirancang untuk memberikan keterampilan praktis dan teknis yang dibutuhkan oleh industri, sehingga lulusan SMK diharapkan siap bekerja segera setelah menyelesaikan pendidikan mereka (Soleh, 2023). Namun, kondisi TPT yang tinggi dari lulusan SMK/MAK menunjukkan adanya masalah dalam penyerapan tenaga kerja ini di pasar kerja. Padahal, tujuan utama pendidikan kejuruan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 adalah untuk menciptakan lulusan yang siap bekerja.

Hal tersebut bisa dilihat dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2023 menunjukkan bahwa jumlah lulusan SMK yang menganggur mencapai 1,6 juta orang. Angka ini mencakup 20 persen dari total pengangguran yang mencapai 7,99 juta orang di Indonesia (BPS, 2023).

Tingginya angka pengangguran ini dapat dilihat dengan beberapa penyebab. Pertama, karena Pengelola SMK pun kurang mengefisienkan waktu dalam menciptakan tenaga kerja yang disiplin. Mengambil sample dari hasil penelitian SMKN 3 Yogyakarta menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya kemampuan siswa dalam manajemen waktu belajar teralihkan untuk bermain game dan media sosial, serta padatnya jadwal belajar siswa. Selain itu, pengelola SMK kurang aktif dalam mempromosikan sekolah dan tidak menjalankan tugas utama SMK, yaitu menciptakan tenaga kerja siap pakai dengan memperbanyak mata pelajaran praktik. Idealnya, minimal 60% dari total jam pelajaran siswa seharusnya diisi dengan mata pelajaran praktik (Bastomi, 2020).



Kurikulum pendidikan dinilai sebagai pemicunya, belum mampunya mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan pasar, sehingga lulusan ini tidak memiliki keahlian teknis atau profesional yang dibutuhkan oleh industri. Hal ini menyebabkan mereka tidak memenuhi kualifikasi untuk banyak posisi yang tersedia. Akibatnya, lulusan ini tidak mampu memenuhi ekspektasi industri dalam menyediakan lulusan dengan keterampilan dan kesiapan yang diperlukan untuk dunia kerja, yang berkontribusi pada tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMK (Alawyah, 2024).

Selain itu, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dinilai belum mampu menyediakan lulusan yang cocok dengan kebutuhan pasar dan dunia kerja. Berdasarkan pengalaman dari pelaku industri, sangat sedikit lulusan pendidikan vokasi yang memiliki kematangan sikap dan mental untuk siap menghadapi budaya kerja secara profesional. Ketidaksinkronan Link and match antara kompetensi yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan kebutuhan industri ini menyebabkan lulusan SMK menjadi kontributor utama dalam tingkat pengangguran terbuka di Indonesia (Fakhri & Yufriidawati, 2014).

b. Lulusan Universitas

Orientasi lulusan perguruan tinggi yang diarahkan untuk bekerja di sektor formal menghadapi kenyataan bahwa sektor ini kesulitan menyerap mereka. Meskipun banyak mahasiswa yang bercita-cita mendapatkan pekerjaan di sektor formal setelah lulus, kenyataan menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan di sektor ini sangat terbatas (Astriani & Nooraeni, 2020). Kondisi ini menyebabkan tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan universitas, yang dihadapkan pada kesulitan mencari pekerjaan sesuai dengan harapan dan kualifikasi mereka.

Tren perekrutan di sektor formal telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan berkurangnya peluang kerja bagi lulusan baru. Penurunan dapat dilihat dari hasil survey yang dikeluarkan oleh SAKERNAS, dilihat bahwa penciptaan lapangan kerja formal menurun drastis dari periode 2009-2014 hingga periode 2019-2024. Pada periode 2009-2014, sektor formal sebanyak 15,6 juta orang, namun jumlah ini mengalami penurunan menjadi 8,5 juta orang pada tahun 2014 sampai tahun 2019, lebih jauh lagi hanya 2 juta orang pada periode 2019-2024 (BPS, 2024). Kondisi ini menyebabkan semakin sedikitnya peluang bagi lulusan baru untuk memasuki pasar kerja formal, di mana persaingan menjadi semakin ketat.

Masalah ini diperburuk oleh persyaratan sector formal bagi para lulusan baru yakni pengalaman kerja yang sering kali menjadi syarat untuk mendapatkan pekerjaan formal. Banyak perusahaan mensyaratkan pelamar memiliki pengalaman kerja sebelumnya, yang menimbulkan dilema bagi lulusan baru yang belum memiliki pengalaman tersebut. Persyaratan ini membuat lulusan baru sulit mendapatkan pekerjaan pertama mereka, sehingga berdampak langsung pada tingginya angka pengangguran di kalangan generasi muda (Setyanti & Finuliyah, 2022). Pengangguran intelektual dengan status lulusan baru ini dapat dilihat sebagai tidak adanya resiliensi pemerintah dan sistem pendidikan yang tidak mampu menghasilkan tenaga kerja berkualitas sesuai kebutuhan pasar kerja. Hal ini sering membuat tenaga kerja terdidik kalah bersaing dengan tenaga kerja asing.

Di Indonesia, kita menghadapi tantangan serius di mana banyak lulusan terdidik mengalami pengangguran meskipun memiliki gelar akademis. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan dalam sistem pendidikan kita, yang belum mampu menghasilkan tenaga kerja yang profesional dan siap untuk dunia kerja. Saat ini, pendidikan cenderung terlalu fokus pada teori tanpa memberikan cukup penekanan pada praktik. Proses pembelajaran yang sering monoton juga berpotensi membuat siswa kehilangan minat. Akibatnya, meskipun kita



mungkin unggul dalam pemahaman teoritis, kita sering kali gagal dalam menerapkannya secara praktis dan mengembangkan profesionalisme di lingkungan kerja.

Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Pengangguran Kerja

Pengangguran berpotensi menyebabkan berbagai masalah seperti kriminalitas, gejolak sosial, politik, dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga mengakibatkan pemborosan yang signifikan karena setiap individu tetap membutuhkan kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, minyak, pakaian, listrik, dan air bersih, meskipun mereka tidak memiliki penghasilan. Oleh karena itu, terlepas dari alasan dan kondisi apa pun yang dihadapi Indonesia saat ini, masalah pengangguran harus diatasi melalui berbagai upaya. Pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat melalui kebijakannya untuk mengatasi pengangguran demi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Ini sejalan dengan UUD 45 pasal 27 ayat 2, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. (Hia, 2015).

Tingginya tingkat pengangguran di kalangan generasi muda, terutama dalam kategori NEET (Not in Education, Employment, or Training), merupakan perhatian serius. Penulis mengutip pernyataan Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kemenko Perekonomian, Chairul Saleh, mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran ini.

Dalam pengetasan pengangguran, pemerintah telah menekankan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagai langkah mengurangi pengangguran di tingkat SMK. Dalam upaya ini, pemerintah berusaha untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Kerjasama dengan KADIN diharapkan dapat membantu memetakan kebutuhan pasar serta memastikan bahwa lulusan vokasi memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan industri. Langkah ini diambil oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan harapan dapat mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia.

Strategi lainnya dalam pengetasan pengangguran yang diambil oleh Kemenko Perekonomian melalui kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran di kalangan muda adalah proses rekonstruksi ulang untuk perubahan pola pikir menuju konsep belajar sepanjang hayat atau "lifelong learning". Salah satu program yang ditawarkan untuk merubah pola pikir ini adalah melalui "Program Prakerja", yang menyediakan berbagai pelatihan terkini sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini.

Program Kartu Prakerja, yang diresmikan melalui Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja, dirancang untuk membantu berbagai kalangan dalam meningkatkan kompetensi kerja. Program ini ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja, serta individu yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Melalui program ini, peserta menerima kartu yang memungkinkan mereka mengakses pelatihan vokasi, termasuk skilling, up-skilling, dan re-skilling (triple skilling), serta sertifikasi kompetensi (Muhyiddin et al., 2022).

Meskipun tidak ada spesifikasi khusus yang membatasi program ini hanya untuk lulusan SMK atau universitas, program Kartu Prakerja terbuka untuk umum. Artinya, baik lulusan SMK maupun lulusan universitas dapat mengikuti program ini untuk meningkatkan keterampilan mereka sesuai kebutuhan pasar kerja. Ini mencakup berbagai bidang dan tidak terbatas hanya pada satu jenis pendidikan tertentu. Terdapat sebuah inisiatif pemerintah Indonesia melalui Prakerja dalam mendukung peningkatan kompetensi kerja bagi masyarakat.

Program ini terbuka bagi semua warga negara Indonesia yang berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang bersekolah atau bekerja saat pendaftaran. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi (www.prakerja.go.id). Peserta perlu memverifikasi identitas dan mengikuti



seleksi yang mencakup tes kemampuan serta motivasi kerja yang diselenggarakan oleh penyelenggara program. Bagi peserta yang lolos seleksi, mereka akan menerima bantuan dana sebesar Rp. 3.550.000. Dana ini dialokasikan untuk biaya pelatihan sebesar Rp. 1.000.000, yang dapat digunakan untuk mengikuti tiga kursus, serta bantuan manfaat sebesar Rp. 2.400.000 yang dibayarkan selama empat bulan. Selain itu, peserta akan menerima insentif sebesar Rp. 150.000 untuk pengisian survei dan bantuan tambahan sebesar Rp. 600.000 hingga Rp. 700.000 (Keanu, 2023).

Program ini, tidak hanya dapat meningkatkan keterampilan kepada masyarakat yang mengikuti, tetapi juga memberikan sertifikat yang mengakui keahlian yang diperoleh. Ini membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pekerjaan informal atau bahkan menjadi wiraswasta dengan basis keahlian yang telah mereka peroleh melalui program ini. Misalnya, seseorang yang telah mengikuti pelatihan otomotif melalui Kartu Prakerja dapat memulai usaha bengkel mobil sendiri. Mereka yang mengambil pelatihan memasak bisa membuka usaha masakan di rumah atau di lokasi tertentu. Begitu juga dengan orang yang memilih pelatihan menjahit, mereka bisa membuka usaha jahit dari rumah.

Melalui kartu prakerja masyarakat akan mendapatkan keahlian (Skill) dan Sertifikat keahlian dari Kartu Prakerja. Kedua hal tersebut, dapat digunakan sebagai bukti kompetensi yang dimiliki saat mencari pekerjaan formal dan skill dapat dipakai untuk mendirikan usaha informal. Ini mengubah paradigma pekerjaan dari sekadar mencari pekerjaan di perusahaan menjadi memiliki kemampuan untuk berwirausaha dengan keahlian yang dimiliki. Pada akhirnya, para peserta tidak hanya meningkatkan keterampilan individu untuk pasar kerja, tetapi juga mengembangkan potensi untuk mandiri secara ekonomi melalui berbagai peluang usaha berbasis skill yang dikuasai.

Strategi kedua dalam mengatasi jumlah angka pengangguran yang tinggi, adalah melalui peningkatan jumlah pengusaha hal tersebut lanjutan dari keahlian dan skill diatas. Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Kemenko Perekonomian, berencana membangun ekosistem wirausaha di dalam negeri. Kebijakan ini menargetkan jumlah wirausaha mapan meningkat dari 3,04% pada Agustus 2023 menjadi 3,95%.

Target ini diharapkan dapat didorong oleh pemerintah daerah melalui implementasi Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam peraturan ini, mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk setidaknya satu lembaga inkubator wirausaha di daerahnya. Hal tersebut dilihat bisa mendorong golongan muda dan usia produktif yang tidak bekerja untuk bisa menjadi wirausaha atau menciptakan perusahaan rintisan di bidang digital. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di kalangan generasi muda dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Bahasan.

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan terkait dengan bahasan angka pengangguran di Indonesia tahun ini, diperoleh informasi bahwa terhitung bulan Januari terdapat 7,20 juta orang pengangguran (BPS, 2024). Angka ini merupakan angka yang cukup besar dalam melihat skala pengangguran di Indonesia. Secara lebih lanjut, penulis melihat data BPS untuk memetakan terkait usia dan generasi mana yang merupakan penyumbang terbesar terhadap angka pengangguran di Indonesia. Untuk itu setelah penulis melakukan penelusuran data, ditemukan hasil olah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 yang terlampir pada gambar (bagian I) diatas. Data menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia secara signifikan didominasi oleh angkatan kerja muda, diketahui bahwa lebih dari 59% dari total pengangguran berusia antara 15 hingga 29 tahun. Total pengangguran dalam kelompok usia ini mencapai 4,98 juta jiwa, dengan rincian yang



mencolok, seperti 1,13 juta jiwa untuk usia 15-19 tahun, 2,5 juta jiwa untuk usia 20-24 tahun, dan 1,34 juta jiwa untuk usia 25-29 tahun.

Berdasarkan data itu maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran terbanyak yaitu usia muda, jika dilihat dari generasinya di mayoritas oleh generasi Z . Hal tersebut dikarenakan jika, berdasarkan definisi umur Gen Z dari tahun 1997 hingga 2012(mulai umur 12-27 tahun), hal tersebut sesuai dengan data temuan.

Selanjutnya, penulis tertarik untuk mengeksplorasi pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan di kalangan tenaga kerja muda(data terlampir pada Gambar II). Ditemukan bahwa pada tahun 2024, lulusan SMK memiliki tingkat pengangguran tertinggi, mencapai 8,62%. Diikuti oleh lulusan SMA dengan tingkat pengangguran sebesar 6,73%, dan lulusan Pendidikan Tinggi dengan tingkat pengangguran 5,63%.

Hal tersebut menarik perhatian penulis terkait tingginya angka pengangguran pada tingkat pendidikan ini, oleh karenanya peneliti menelusuri terkait alasan tingginya angka pengangguran ini. Pertama, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memucaki angka pengangguran tertinggi pertama. Berdasarkan hasil penelitian dan jurnal yang membahas topik ini, diketahui bahwa tingginya angka pengangguran dengan lulusan smk dikarenakan ; penyebab pertama, pengelola SMK dinilai kurang aktif dalam mempromosikan sekolah dan tidak menjalankan tugas asli dari SMK, yaitu menciptakan tenaga kerja siap pakai dengan memperbanyak mata pelajaran praktik, minimal 60% dari total jam pelajaran siswa. Penyebab lainnya,yakni karena kurikulum pendidikan SMK. Kurikulum ini, dinilai belum mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan pasar, sehingga lulusan tidak memiliki keahlian teknis atau profesional yang dibutuhkan oleh industri. Hal ini menyebabkan mereka tidak memenuhi kualifikasi posisi yang tersedia. Lulusan kedua, yakni pengangguran dengan lulusan SMA, hal ini dikarenakan para lulusan mempersiapkan pendidikan di universitas, pada lulusan banyak dikategorikan sebagai penganggur musiman karena orientasinya setelah tamat akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Ketiga yakni, lulusan Pendidikan Tinggi. Pengangguran lulusan ini berdasarkan hasil penelitian disebabkan karena mayoritas lulusan ini orientasi kerjanya yakni ingin mendapatkan pekerjaan dan bekerja pada sektor formal yang dinilai lebih menjamin karena lulusan ini telah menempuh pendidikan di universitas dan menyandang gelar sarjana. Hal tersebut ternyata tidak relevan antara harapan dan ekspektasi karena perekrutan di sektor formal telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan berkurangnya peluang kerja bagi lulusan baru. Penurunan ini terlihat dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja formal menurun drastis dari periode 2009-2014 hingga periode 2019-2024. Pada periode 2009-2014, sektor formal mampu menyerap 15,6 juta orang, namun jumlah ini menurun menjadi 8,5 juta orang pada periode 2014-2019, dan lebih jauh lagi hanya 2 juta orang pada periode 2019-2024. Kondisi ini menyebabkan semakin sedikitnya peluang bagi lulusan baru untuk memasuki pasar kerja formal, di mana persaingan menjadi semakin ketat.

Pengangguran pada Lulusan Pendidikan Tinggi juga diakibatkan oleh persyaratan sektor formal bagi para lulusan baru yakni pengalaman kerja yang sering kali menjadi syarat untuk mendapatkan pekerjaan formal. Banyak perusahaan mensyaratkan pelamar memiliki pengalaman kerja sebelumnya, kendala ini jelas dirasakan bagi yang baru lulus yang berstatus sebagai Fresh graduate.

Dengan tingginya angka pengangguran ini maka perlulah upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran ini terutama bagi angkatan kerja muda yang seharusnya menjadi bonus demografi indonesia emas tahun 2045 namun realitanya angkatan ini menjadi penyumbang besar dalam angka pengangguran di indonesia.



Melihat dari segi kebijakan penulis melihat fokus kebijakan yang dilakukan sejauh ini, adalah melalui kartu pra kerja dan mendorong untuk terciptanya wirausaha muda. Pertama, kartu pra kerja, meskipun tidak ada spesifikasi khusus yang membatasi program ini hanya untuk lulusan SMK atau universitas, program Kartu Pra Kerja terbuka untuk umum. Artinya, baik lulusan SMK maupun lulusan universitas dapat mengikuti program ini untuk meningkatkan keterampilan mereka sesuai kebutuhan pasar kerja. Terdapat sebuah inisiatif pemerintah Indonesia melalui program kartu pra kerja.

Program ini, memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengakses layanan pelatihan vokasi yang mencakup skilling, upskilling dan mendapatkan sertifikat kompetensi. Program ini membantu masyarakat mendapatkan keahlian(Skill) dan Sertifikat keahlian dari pelatihan yang diikuti. Kedua hal tersebut, dapat digunakan sebagai bukti kompetensi yang dimiliki saat mencari pekerjaan formal dan skill dapat dipakai untuk mendirikan usaha informal. Ini mengubah paradigma pekerjaan dari sekadar mencari pekerjaan di perusahaan menjadi memiliki kemampuan untuk berwirausaha dengan keahlian yang dimiliki. Contohnya, seseorang yang telah mengikuti pelatihan otomotif melalui program ini dapat memulai usaha bengkel mobil sendiri. Mereka yang mengambil pelatihan memasak bisa membuka usaha masakan di rumah. Begitu juga dengan orang yang memilih pelatihan menjahit, mereka bisa membuka usaha jahit dari rumah.

Strategi kedua, melalui peningkatan jumlah pengusaha hal tersebut lanjutan dari keahlian dan skill diatas. Tujuannya membangun ekosistem wirausaha di dalam negeri. Target ini diharapkan dapat didorong oleh pemerintah daerah melalui implementasi Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Melalui program ini, mewajibkan pemerintahan di daerah untuk membentuk setidaknya satu lembaga inkubator wirausaha di daerahnya. Hal tersebut dilihat bisa mendorong golongan muda dan usia produktif yang tidak bekerja untuk bisa menjadi wirausaha atau menciptakan perusahaan rintisan di bidang digital.

Program ini mendorong skill, sebagai inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengatasi pengangguran, dapat dianalisis melalui pendekatan struktural fungsionalisme Talcott Parsons. Pendekatan ini memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana program ini berfungsi dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat.

Pertama-tama, Program Kartu Prakerja berperan sebagai mekanisme integrasi sosial. Dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada individu yang menganggur, program ini membantu mereka untuk kembali terlibat dalam struktur sosial dan ekonomi secara produktif. Ini tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi peserta, tetapi juga mengurangi beban sosial ekonomi yang ditanggung masyarakat.

Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai penyeimbang sosial. Dalam konteks ini, Prakerja memberikan kesempatan yang sama memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam pasar kerja. Hal ini bertujuan untuk mengurangi disparitas sosial dan ekonomi, serta memberdayakan individu untuk mencapai kesejahteraan secara mandiri. Namun disini penulis menulis kritik pula terhadap program pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Penulis melihat memang prakerja ini memiliki tujuan jangka panjang untuk pelatihan skill sehingga bisa membuka kreativitas dan usaha selain itu ada pula pemberian sertifikat untuk dipakai mendaftar pekerjaan di perusahaan dan pekerjaan formal lainnya. Kritik penulis tekankan pada implementasinya kebijakan ini di lapangan.

Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala atau masalah yang muncul. Pertama, Meskipun program ini menawarkan ratusan konten pelatihan secara daring, hanya 55 persen dari konten tersebut yang dinilai layak untuk dilaksanakan secara online. Sebaliknya, 89 persen konten pelatihan yang tersedia gratis di YouTube dinilai lebih sesuai untuk pelatihan online. Ini



menunjukkan bahwa hampir setengah dari konten pelatihan dalam program ini mungkin tidak sepenuhnya efektif jika dilakukan secara daring. Kedua, penerbitan sertifikat tanpa penyelesaian pelatihan. Jika berdasarkan kebijakan resmi, peserta hanya dapat menerima insentif setelah menyelesaikan pelatihan yang ditandai dengan sertifikat. Namun, banyak platform digital yang bermitra dengan Kartu Prakerja menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan seluruh paket pelatihan yang telah dipilih. Hal ini menyebabkan banyak peserta yang tidak melanjutkan pelatihan hingga selesai, sehingga mereka menerima sertifikat tanpa benar-benar memperoleh keterampilan yang dijanjikan. Ketiga, Pemberian insentif sebelum penyelesaian pelatihan. Pemerintah telah membayar biaya pelatihan, namun insentif diberikan tanpa memastikan bahwa peserta telah menyelesaikan pelatihan. Ini menciptakan ketidaksesuaian antara pemberian insentif dan penyelesaian pelatihan, yang dapat merugikan efektivitas program.

Secara keseluruhan, menunjukkan kelemahan signifikan dalam desain dan pelaksanaan program kartu prakerja. Untuk meningkatkan efektivitas program, penulis melihat perlunya evaluasi ulang dalam pelaksanaan program kebijakan ini serta meningkatkan kualitas pelatihan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung peserta yang ikut sehingga skill nya memang benar-benar didapatkan pesertanya, kedua memastikan juga sertifikat hanya diberikan setelah penyelesaian latihan agar program ini bisa menghasilkan lulusan yang benar-bener punya keahlian sesuai sertifikat tersebut, dan terakhir perlunya menyesuaikan mekanisme pemberian insentif agar selaras dengan penyelesaian pelatihan. Dengan demikian, program ini dapat memberikan manfaat maksimal kepada peserta dan memastikan penggunaan dana yang lebih efisien dan tepat sasaran sehingga selain sertifikat dan insentif skill itu benar-benar didapatkan oleh pesertanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan, jumlah pengangguran di Indonesia pada Januari 2024 mencapai 7,20 juta orang (BPS, 2024), dengan lebih dari 59% di antaranya merupakan angkatan kerja muda berusia 15-29 tahun, yang mayoritas berasal dari generasi Z. Dalam hal tingkat pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyumbang angka pengangguran tertinggi sebesar 8,62%, disusul oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,73%, dan lulusan perguruan tinggi sebesar 5,63%.

Tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMK disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya promosi sekolah oleh pengelola SMK dan kurikulum yang belum mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Sementara itu, lulusan SMA banyak dikategorikan sebagai penganggur musiman karena orientasinya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Adapun lulusan pendidikan tinggi mengalami pengangguran karena berkurangnya peluang kerja di sektor formal yang semakin ketat, serta persyaratan pengalaman kerja yang sering kali menjadi kendala bagi fresh graduate.

Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Kartu Pra Kerja yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan memberikan sertifikasi kompetensi kepada masyarakat. Meskipun program ini memiliki tujuan yang baik, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala seperti efektivitas pelatihan daring, penerbitan sertifikat tanpa penyelesaian pelatihan, dan pemberian insentif yang tidak selaras dengan penyelesaian pelatihan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas program, perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap pelaksanaannya, memastikan kualitas pelatihan yang lebih baik, sertifikat hanya diberikan setelah penyelesaian pelatihan, dan menyesuaikan mekanisme pemberian insentif. Dengan demikian,



program ini dapat memberikan manfaat maksimal kepada peserta dan memastikan penggunaan dana yang lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga keterampilan yang diperoleh dapat benar-benar membantu mengurangi angka pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawyah, K. (2024). Problematika Dalam Implementasi Kurikulum. 7(1), 1–6. Diakses pada 15 Juni 2024
- Aprianto.(2013). Hubungan Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terbuka di Indonesia. Proceeding PESAT. Vol. 5 : 398- 405 Diakses pada 16 Juni 2024.
- Astriani, V., & Nooraeni, R. (2020). Determinan Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi Di Indonesia Tahun 2018. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 8(1), 31–37. <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n1.p31-37>. Diakses pada 17 Juni 2024.
- Bastomi, H. (2020). Pemetaan Masalah Belajar Siswa SMK Negeri 3 Yogyakarta Dan Penyelesaiannya (Tinjauan Srata Kelas). Konseling Edukasi “Journal of Guidance and Counseling,” 4(1), 35–55. <https://doi.org/10.21043/konseling.v4i1.7418>. Diakses pada 17 Juni 2024.
- Fakhri, E., & Yufriawati. (2014). Relevansi kompetensi dan tingkat daya saing lulusan smk dalam dunia kerja (studi kasus pada smk teknik otomotif di empat kabupaten/kota). Repositori Institusi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, 1–18. Diakses pada 17 Juni 2024.
- Hia, D. (2015). Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran. *Economica*, 1(2), 208–213. <https://doi.org/10.22202/economica.2013.v1.i2.121>. Diakses pada 17 Juni 2024.
- Hia, D. (2015). Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran. *Economica*, 1(2), 208–213. <https://doi.org/10.22202/economica.2013.v1.i2.121>. Diakses pada 18 Juni 2024.
- Jibril, H. T., Susilo, S., & Sakti, R. K. (2022). Pemodelan tingkat pengangguran di Indonesia dengan random effect spasial autoregression (Sar-Re). JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 8(4), 1090. <https://doi.org/10.29210/020221721>. Diakses pada 18 Juni 2024.
- Keanu. (2023). Analisis Efektivitas Program Kartu Prakerja. June. Diakses pada 19 Juni 2024.
- Keanu. (2023). *Analisis Efektivitas Program Kartu Prakerja. June*. Diakses pada 19 Juni 2024.
- Muhyiddin, M., Putra, F., Suryono, I. L., Yanwar, Y., Warsida, R. Y., & Yani, R. A. A. (2022). Program Kartu Prakerja: Konsepsi dan Implementasi Kebijakan Welfare-to-work di Masa Pandemi Covid-19. Bappenas Working Papers, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.123> Diakses pada 19 Juni 2024.
- Nur, et al. (2016). Pengangguran Terdidik di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Analisis. Vol. 5(1) : 29-33. Diakses pada 20 Juni 2024.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Diakses pada 22 Juni 2024.



- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Diakses pada 22 Juni 2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi. Diakses pada 22 Juni 2024.
- Rusydiah, E. F., & Rohman, F. (2020). Local Culture-Based Education: An Analysis of Talcott Parsons' Philosophy. *International Journal of Innovation, Creativity and Change.*, 12(3), 1–16. Diakses pada 20 Juni 2024.
- Rusydiah, E. F., & Rohman, F. (2020). Local Culture-Based Education: An Analysis of Talcott Parsons' Philosophy. *International Journal of Innovation, Creativity and Change.*, 12(3), 1–16. Diakses pada 20 Juni 2024.
- Sakitri, G. (2021). Angkatan Kerja Generasi Z. *Forum Manajemen Prasetiya Mulya*, 35(2), 1–10. Diakses pada 21 Juni 2024.
- Setyanti, A. M., & Finuliyah, F. (2022). Pengangguran Terdidik Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Pada Data Sakernas 2020. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(1). <https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.118>. Diakses pada 21 Juni 2024.
- Soleh, A. (2017). Isu Dalam Ketenagakerjaan Dalam Suatu Negara. 6(2), 83–92. Diakses pada 21 Juni 2024.
- Soleh, A. (2017). *Isu Dalam Ketenagakerjaan Dalam Suatu Negara*. 6(2), 83–92. Diakses pada 21 Juni 2024.
- Soleh. (2023). Tinjauan Pustaka Sistematis: Model Kemitraan antara SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri. *Jiptek*, 16(2), 126. <https://doi.org/10.20961/jiptek.v16i2.72697>. Diakses pada 21 Juni 2024
- Suhaeri, F. (2021). Determinan pengangguran usia muda di indonesia. *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, 18(3), 363–368. Diakses pada 21 Juni 2024.
- Umanailo, M. C. B. (2019). Talcot Parson and Robert K Merton. *Researchgate.Net*, October, 1–5. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9pmt3>.
- Umanailo, M. C. B. (2019). Talcot Parson and Robert K Merton. *Researchgate.Net*, October, 1–5. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9pmt3>. Diakses pada 22 Juni 2024.